

Minggu, 14 Juni 2009 pukul 01:43:00

## Dialog Antaragama Pentingnya Toleransi dalam Perbedaan

### TEMA UTAMA

"Pancasila, Bhinneka Tunggal Eka, Undang-Undang Dasar 1945, radikalisme, liberalisme, moderat, NU, dan Muhammadiyah."

Kata-kata itu--paling tidak selama tiga hari, 27-29 Mei lalu--kerap terdengar di beberapa ruangan di Universitas Wina (University of Vienna), Austria.

Kata-kata itu disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi (ketua umum PBNU), Prof Dr Syafiq Mughni (ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), Prof Dr Romo Frans Magnis Suseno (pendeta Katolik), Pendeta Natan Setiabudi (mantan ketua umum Asosiasi Gereja Indonesia/Protestan), I Dewa Gede Palgunadi MA (dosen Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali/Hindu), Dr Fatimah Husein (dosen Fakultas Filsafat dan Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, Yogya), dan Prof Dr Siti Musdah Mulia (Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian).

Para tokoh agama dan akademisi dari Indonesia tersebut merupakan sebagian pembicara dalam acara Austrian-Indonesian Dialogue Symposium dengan tema *State, Law, and Religion in Pluralistic Societies: Austrian and Indonesian Perspectives*. Dalam acara ini, Indonesia mengirimkan delegasi beranggotakan 14 orang yang dipimpin langsung oleh Dirjen Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri RI, Andri Hadi.

Mereka berhadapan dengan 19 pembicara dari Austria yang sebagian besar juga bergelar profesor doktor. Para pembicara dari Austria yang dipimpin oleh Dirjen Kebijakan Luar Negeri untuk Budaya pada Kementerian Federal untuk Eropa dan Urusan Internasional, Austria, ini merupakan tokoh-tokoh beken yang sering tampil di forum-forum internasional yang membahas masalah agama, radikalisme dalam beragama, hukum, perdamaian, pendidikan, dan sebagainya.

Mereka juga menyandang sederet jabatan penting di negaranya. Misalnya, Prof Dr Ednan Aslan adalah kepala Pendidikan Islam di Departemen Agama Islam, Fakultas Filsafat dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wina. Guru besar beragama Islam asal Turki ini sering tampil di media setempat mengenai umat Islam dan permasalahannya.

Lalu, ada Pendeta Petrus Bsteh (presiden Konferensi Agama dan Perdamaian Austria yang juga mantan rektor Institut Afro-Asia di Wina), Prof Dr Ingeborg Gabriel (ketua Departemen Sosial Etik, Fakultas Teologi Roman Katolik, Universitas Wina), Dr Wilfried Graf (direktur pelaksana The Institut for Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding), Prof Dr Stefan Hammer (guru besar di Departemen Konstitusi dan Administrasi Hukum, Universitas Wina), Prof Dr Susanne Heine (kepala Departement of Practical Theology and Psychology of Religion, Faculty of Protestant Theology, Universitas Wina).

Selanjutnya adalah Dr Brigitte Holzner (ahli dalam masalah gender dan penasihat di Austrian Development Agency, Wina), Prof Dr Rene Kuppe (guru besar Departement of Legal Philosophy, Law of Religion and Culture, Universitas Wina), Prof Dr Ruediger Lohlker (ketua Islamic Studies, Institute of Oriental Studies, Universitas Wina), Prof Dr Gerhard Luf (guru besar Departement of Legal Philosophy, Law and Religion and Culture, Universitas Wina), Prof Dr Irmgard Marboe (guru besar Departement of European, International and Compatative Law, Universitas Wina), serta Franz Rupprecht (penasihat Kardinal Dr Christoph Schonborn, Archbishop of Vienna) yang juga ahli dalam hubungan Kristen dengan Islam. Dari kalangan jurnalis, ada Barbara Trionfi MA, manajer komunikasi dan penasihat kebebasan pers di International Press Institute, Wina.

Peserta dialog Austria-Indonesia ini berasal dari berbagai kalangan. Dari Indonesia, selain para staf di Kedutaan Besar RI di Wina, juga hadir wakil-wakil dari masyarakat Indonesia di Wina dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Selain itu, juga hadir presiden Austria-Indonesia Friendship

Association. Sedangkan, dari Austria, selain pejabat pemerintah, akademisi, jurnalis, hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan mahasiswa.

Tema yang dibahas pun bermacam-macam. Antara lain adalah *Peran Komunitas Umat Beragama dalam Mempromosikan Toleransi di Masyarakat, Kebebasan Beragama, Sekulerisme, dan Netralitas Negara; Peran Agama dalam Mempromosikan Demokrasi dan Kehidupan Sosial di Masyarakat; Hak-hak Minoritas, Otonomi, dan Pluralisme; Globalisasi dan Modernitas Islam; Hak Asasi Manusia dalam Konteks Eropa; Austria-Indonesia: Cara Mengelola Perbedaan dalam Masyarakat Plural*; dan lain sebagainya yang semuanya terkait dengan masalah agama dan toleransi umat beragama.

### **Toleransi umat beragama**

Sesuai dengan tema-tema tersebut, para pembicara dari Indonesia pun menceritakan pengalaman Indonesia dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan umat beragama dari kacamata masing-masing. Di sinilah, penyebutan istilah Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan seterusnya seperti menjadi 'mantra'.

Romo Frans Magnis Suseno, misalnya, menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan alat paling ampuh untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ia pun memuji para pendiri Indonesia yang berpandangan jauh ke depan. Sebagai contoh, katanya, meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikannya sebagai negara Islam. "Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara sekuler karena masyarakatnya sangat agamis."

Dengan Pancasila sebagai dasar negara, menurut Romo Magnis, masyarakat Indonesia bebas memeluk dan melaksanakan agama masing-masing. "Sebagai umat Katolik, saya bersyukur karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia, sekitar 85 persen lebih, sangat toleran," ujarnya.

Toleransi umat Islam itu, lanjutnya, ditunjukkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Yakni, kerelaan sejumlah tokoh Islam pendiri bangsa (*founding father*) untuk menghapuskan tujuh kata yang berbunyi, "Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya," dari Piagam Jakarta.

"Sampai sekarang, setiap Natal, para pemuda NU ikut menjaga sejumlah gereja," lanjut Romo Magnis sembari menunjuk KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU.

Tingkat toleransi agama yang tinggi juga disampaikan Prof Syafiq Mughni dan KH Hasyim Muzadi. Syafiq menyatakan, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, banyak yang muridnya beragama Kristen. "Bahkan, di Kupang, sebagian besar murid sekolah Muhammadiyah adalah Kristen," ujarnya menjawab pertanyaan dari peserta Austria, apakah sekolah Muhammadiyah juga menerima murid Kristen.

Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, menjelaskan, para warga NU yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah--yang juga dianut sebagian besar umat Islam di Indonesia--mengikuti jalan *tawassuth* (jalan tengah) dan *i'tidal* (tegak lurus). *Tawassuth* dan *i'tidal* merupakan esensi dari toleransi.

"Ini bukan berarti tidak berbuat sesuatu atau hanya duduk-duduk di pagar. Tapi, sebaliknya, toleransi adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari keyakinan itu sendiri. Dalam perilaku sehari-hari, toleransi akan menghasilkan keseimbangan dan dialog (*tasyawur*)."

Dalam penerapannya, lanjut Kiai Hasyim, dalam masyarakat yang multiagama (keyakinan) dan budaya, dengan *tawassuth* dan *i'tidal*, seorang Muslim akan bisa bersikap seimbang antara keyakinan dan toleransi.

Menurutnya, keyakinan (beragama) tanpa toleransi akan mengarah pada ekstremisme dan eksklusivisme. Sebaliknya, toleransi tanpa keyakinan akan mengakibatkan seseorang mudah tertipu dan kebingungan.

"Seorang Muslim akan menganggap toleransi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keyakinan. Keseimbangan di sini bukan berarti 50 persen keyakinan dan 50 persen toleransi. Tapi, semuanya. Keyakinan dan toleransi harus penuh 100 persen."

Hasyim juga menjelaskan liberalisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Menurutnya, moderat berbeda dengan keduanya. Kaum liberal, lanjutnya, lebih mengedepankan toleransi daripada

keyakinan (akidah). Mereka menerapkan kebebasan berpikir dalam beragama tanpa kejelasan metodologi. "Hal ini sesungguhnya mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama dan meninggalkan aspek-aspek penting dalam beragama, terutama akidah dan ibadah," tegasnya.

Sebaliknya, kata Hasyim, kaum fundamental melihat mereka yang berbeda pandangan atau keyakinan itu sebagai pihak lawan. Berbeda keyakinan bagi kelompoknya dianggap sebagai musuh.

"Dalam masyarakat yang plural, fundamentalisme dan fanatisme bisa mengakibatkan hilangnya toleransi dan bahkan menyebabkan konflik."

Karena itu, Kiai Hasyim menggarisbawahi bahwa toleransi itu sangat penting bagi Islam. Dengan toleransi, mereka yang berpaham moderat akan berjuang untuk mencapai hidup yang damai dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan. "Inilah wajah Islam yang sebenarnya di Indonesia, yakni Islam yang moderat."

### **Kearifan lokal**

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebijakan Luar Negeri untuk Budaya pada Kementerian Federal untuk Eropa dan Urusan Internasional, Austria, Emil Brix, yang merupakan salah seorang penggagas dialog Austria-Indonesia ini, menyambut baik digelarnya kegiatan yang mempertemukan para tokoh umat beragama di Indonesia dengan para tokoh agama dan akademisi dari Austria.

Menurutnya, dalam perkembangan dunia yang sangat cepat, banyak efek negatif yang muncul di masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. "Di sinilah diperlukan dialog, terutama dengan para tokoh agama yang banyak pengaruhnya di masyarakat," jelas Emil Brix.

Ia memuji Indonesia yang mempunyai kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Brix pun menyebut antara Austria dan Indonesia banyak persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya antara lain masyarakat di kedua negara sangat plural dan menjunjung tinggi kebebasan beragama.

"Dengan adanya dialog antartokoh kedua negara ini, kami harapkan kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing," jelasnya. ikhwanul kiram masyhuri (*Republika 14 Juni 2009*)

**Tags:** [my opini](#)

**Prev:** [Bilateral Interfaith Dialogue](#)

[reply](#) [share](#)